

**DATA KEJADIAN UNJUK RASA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2018**

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat**

Bidang : Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

No	Jenis Kejadian	Banyaknya	Hari/Tanggal/Tempat Kejadian	Penyebab Kejadian	Kerugian		Keterangan
					Jiwa	Material	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Karyawan Klinik Kesehatan Kesuma, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Laporan	Hari Kamis Tanggal 1 Februari 2018, di Klinik Apotek Kesuma Jl. Iskandar Kel. Madirejo Pangkalan Bun	<p>Sebanyak 42 karyawan Klinik Kesehatan Kesuma, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar demonstrasi terhadap pihak manajemenya sendiri Pasalnya, selama dua bulan para karyawan ini belum mendapatkan gaji.</p> <p>Para karyawan klinik tersebut melakukan demo di depan kantor mereka termasuk menahan para anggota manajemen agar tidak pulang, selain itu mereka berorasi sambil memperlihatkan kertas yang bertuliskan antara lain, "Kami butuh gaji bukan janji palsu."</p> <p>Para karyawan berdemo juga menutup belakang mobil direktur dengan menggunakan mobil ambulance klinik, agar tidak bisa keluar sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Bukan itu saja, karyawan yang marah-marah ini juga menggeber mobil ambulance serta membunyikan sirine, serta melepas seluruh atribut yang ada pada bagian depan klinik.</p> <p>Dalam orasinya, mereka menginginkan pemilik klinik hadir di lokasi untuk mendengarkan orasi mereka sekaligus membayar langsung gaji mereka yang tertunggak. Suasana pun sempat tegang dan penuh dengan</p>	-	-	Berjalan dengan Aman dan Kondusif

<p>2</p> <p>Karyawan PT Marga Dinamik Perkasa (MDP)</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, masuk kawasan Desa Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat</p>	<p>emosi, para karyawan yang sudah pada pucak emosi terus berorasi dan menahan direktur dan karyawan bagian keuangan, agar tidak pulang.</p> <p>Puluhan karyawan PT Marga Dinamik Perkasa (MDP) menggelar Demonstrasi. Aksi puluhan karyawan yang mayoritas sopir ini, karena tidak terimanya atas pemberian santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, yang diberikan perusahaan itu kepada salah seorang rekan kerja mereka, pada 2017 silam. Menurut keterangan para pendemo yang didampingi Pengurus Unit Kerja (PUK) PT MDM Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, Sirajudin bahwa karyawan yang meninggal kecelakaan kerja tersebut tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya santunan yang diberikan hanya Rp 25 juta. tuntutan pendemo yang lain adalah berkenaan dengan pembagian armada yang dianggap tidak profesional dan dituding hanya didasarkan suka dan tidak suka saja. Selain itu ada juga dugaan permainan uang untuk mendapat armada baru. para pendemo juga menuntut kenaikan gaji karyawan yang dianggap masih di bawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Dan tuntutan terakhir, agar manajemen yang ada di Kotawaringin Barat diganti.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>
<p>3</p> <p>Pengurus tinggi Forum Koordinasi Kelompok Tani Dayak Misik baik provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Senin Tanggal 16 Juli 2018, di lokasi Kantor PT Gunung Sejahtera Ibu Peritwi (GSIP), anak perusahaan dari PT Astra Agro Lestari (AAL) Pangkalan Bun</p>	<p>Ketua Kelompok Tani Dayak Misik Desa Rangka, Didik, dalam orasinya, menuntut hak sebagai orang Dayak. Menurutnya, selama ini perusahaan tidak memperhatikan orang Dayak. Aksi ini dilaksanakan, karena perusahaan Astra tidak mengindahkan surat-surat yang pernah disampaikan Adapun tuntutan dari kelompok tani Dayak Misik:</p> <p>(1) Menuntut tanah adat masyarakat kelompok tani Dayak Misik,</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>

<p>bersama warga Desa dari Medang Sari, Runtu, Umpang, Nanga Mua, Panahan, Kerabu, Kelurahan Pangkut, Ranga, Pandu Senjaya, Sebuk, Sungai Rangit Jaya, dan Desa Sungai Melawen</p>	<p>Desa Sari, Umpang, Mua, Panahan, Kerabu, Kelurahan Pangkut, Pandu Senjaya, Sungai Rangit Jaya, dan Desa Sungai Melawen</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018, di lokasi kantor PT. Surya Sawit Sejati (SSS) di Kecamatan Pangkalan Lada Kab. Kobar</p> <p>Masa aksi tersebut dipimpin M Bulkan yang merupakan koordinator aksi demo damai, yang dimulai dari Lapangan Sepak Bola Desa Pangkalan Durian dan Bundaran Jagung Kecamatan Pangkalan Lada.</p> <p>Dalam orasinya, pendemo keberatan dan menuntut terkait keberadaan tanah adat seluas 5 hektar yang sebelumnya milik kelompok tani Datak Misik, namun telah digarap perusahaan dan sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga pendemo menuntut lahan adat untuk ditukur ulang serta menolak perpanjangan Izin HGU PT SSS. Setelah orasi pihak PT SSS menyilahkan untuk menggelar pertemuan, dengan 11 perwakilan dari Kelompok Tani Dayak Misik yang diwakili M. Bulkan (Koordinator aksi), Didi, Jamal, Gafuri Ketua DAD Kabupaten Kobar, Harnadi, Misnan, Buharani, Haliman, Hamzah, Mulyadi dan Drs Dagot Sekjen Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi Kalteng.</p>	<p>(2) Meminta kemitraan tanah adat seluas 5 Ha/KK di luar IUP/HGU. (3) Menuntut ukur ulang izin IUP PT Astra Agro Lestari Group/PT Surya Sawit Sejati. (4) Menolak perpanjangan izin HGU PT Astra Agro Lestari Group.</p> <p>Dalam aksi demo tersebut, telah dilakukan mediasi antara pihak perusahaan PT GSDI Kobar dengan perwakilan kelompok tani Dayak Misik</p>	<p>-</p>	<p>-</p> <p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>
<p>4 Ratusan warga kelompok tani Dayak Misik Desa Runtu, Umpang, Dusun Suayap, Amin Jaya dan Sebuk tepatnya desa yang berada di wilayah perkebunan PT Surya Sawit Sejati (SSS) melakukan aksi demo damai</p>	<p>Desa Sari, Umpang, Mua, Panahan, Kerabu, Kelurahan Pangkut, Pandu Senjaya, Sungai Rangit Jaya, dan Desa Sungai Melawen</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018, di lokasi kantor PT. Surya Sawit Sejati (SSS) di Kecamatan Pangkalan Lada Kab. Kobar</p> <p>Masa aksi tersebut dipimpin M Bulkan yang merupakan koordinator aksi demo damai, yang dimulai dari Lapangan Sepak Bola Desa Pangkalan Durian dan Bundaran Jagung Kecamatan Pangkalan Lada.</p> <p>Dalam orasinya, pendemo keberatan dan menuntut terkait keberadaan tanah adat seluas 5 hektar yang sebelumnya milik kelompok tani Datak Misik, namun telah digarap perusahaan dan sudah menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga pendemo menuntut lahan adat untuk ditukur ulang serta menolak perpanjangan Izin HGU PT SSS. Setelah orasi pihak PT SSS menyilahkan untuk menggelar pertemuan, dengan 11 perwakilan dari Kelompok Tani Dayak Misik yang diwakili M. Bulkan (Koordinator aksi), Didi, Jamal, Gafuri Ketua DAD Kabupaten Kobar, Harnadi, Misnan, Buharani, Haliman, Hamzah, Mulyadi dan Drs Dagot Sekjen Kelompok Tani Dayak Misik Provinsi Kalteng.</p>	<p>(2) Meminta kemitraan tanah adat seluas 5 Ha/KK di luar IUP/HGU. (3) Menuntut ukur ulang izin IUP PT Astra Agro Lestari Group/PT Surya Sawit Sejati. (4) Menolak perpanjangan izin HGU PT Astra Agro Lestari Group.</p> <p>Dalam aksi demo tersebut, telah dilakukan mediasi antara pihak perusahaan PT GSDI Kobar dengan perwakilan kelompok tani Dayak Misik</p>	<p>-</p>	<p>-</p> <p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>

<p>5</p> <p>Sejumlah ormas dari adat Dayak, Ormas Islam, dan elemen masyarakat lainnya menggelar aksi di jalan</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Jum'at Tanggal 7 September 2018, Kate Coofe Time dan Bundaran Pancasila Pangkalan Bun</p>	<p>Kegiatan Aksi Unjuk Rasa sehubungan dengan Isu mengenai rencana deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Pangkalan Bun mencuat setelah sejumlah orang mengunggah undangan dan ajakan deklarasi tersebut di media sosial. Deklarasi tersebut konon akan dihadiri sejumlah tokoh #2019GantiPresiden, di antaranya, Neno Warisman, Ahmad Dhani, Mardani Alisera, dan Ratna Sarumpaet, sehingga mereka menolak rencana aksi deklarasi #2019GantiPresiden di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Sejumlah ormas yang hadir pada aksi tersebut di antaranya, Dewan Adat Dayak (DAD), Batamad Kobar, Forum Komunikasi Kerukunan Pemuda (FKKP), Pemuda Dayak Kotawaringin Barat, GP Ansor Kotawaringin Barat, dan Masyarakat Adat Dayak Kotawaringin Barat</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>
<p>6</p> <p>Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pangkalan Bun menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kotawaringin Barat</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Rabu Tanggal 12 September 2018, di depan kantor DPRD Kotawaringin Barat, di Jalan HM Rafi'i, Pangkalan Bun</p>	<p>Kegiatan aksi yang dilakukan KAMMI Pangkalan Bun meminta agar anggota dewan lebih tegas menanggapi masalah perekonomian di Indonesia, terutama semakin menurunnya nilai rupiah atas mata uang asing, anggota KAMMI Pangkalan Bun Eko Wahyudi membacakan puisi yang berisi imbauan agar para anggota DPRD harus lebih tanggap atas permasalahan keuangan negara, serta mengimbau agar masyarakat lebih cinta produk dalam negeri ari pada produk luar negeri</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>
<p>7</p> <p>Pemuda perwakilan dari Forum Pemuda Dewan Adat</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Jum'at Tanggal 14 September 2018 di Bundaran Pancasila Pangkalan Bun</p>	<p>Puluhan pemuda perwakilan dari Forum Pemuda Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah menolak kedatangan Sidik Al Jawawi masuk ke Kabupaten Kobar</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>

<p>8</p> <p>DAD Kobar</p> <p>Kab.</p>	<p>1 Laporan</p>	<p>Hari Kamis Tanggal 29 November 2018 di Bundaran Pancasila Pangkalan Bun</p>	<p>Dalam orasinya, Wendy Suewarno, Ketua Forum Pemuda Dayak menegaskan akan mengusir Sidik Al Jawi alias Sigit Purnawan Ketua Dewan DPP HTI Pusat jika masuk Kobar.</p> <p>penolakan tersebut dilakukan agar Kabupaten Kobar tetap aman dari orang-orang yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan di NKRI. Ia juga meminta kepada aparat Kepolisian dan TNI agar bertindak tegas dalam hal ini</p> <p>Diketahui, kedatangan Sidik Al Jawi alias Sigit Purnawan Ketua Dewan DPP HTI Pusat di Kalimantan Tengah sudah tercium sejumlah Ormas Dayak. Ia disinyalir sudah berada di Kabupaten Sukamara dan rencananya akan meneruskan safari konsolidasi eks anggota HTI di Kabupaten Kobar.</p> <p>Aksi damai oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kab. Kobar terkait penolakan adanya rencana keberangkatan kegiatan 212 dari wilayah Kab. Kobar. Bertindak sebagai korlap Sdr. Wendi dan diikuti sekitar 25 orang.</p> <p>Adapun orasi yang disampaikan oleh Korlap Sdr. Wendi antara lain : Mendoakan agar Kab. Kobar selalu aman dan damai; dari orang-orang yang selalu berlawanan dengan pemerintah, Kami menggelar aksi damai bertujuan untuk mempersatukan jalinan silaturahmi NKRI di wilayah Kab. Kobar, Meminta kepada masyarakat untuk saling menguatkan dan menyatukan tekad sehingga tidak mudah untuk dapat dipecah belah oleh pihak manapun, Menolak adanya gerakan-gerakan dari kelompok radikal dimana dalam situasi Pemilu ini terus melakukan penghasutan agar masyarakat NKRI terpecah belah, Meminta kepada masyarakat agar waspada dalam upaya propaganda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, Meminta kepada simpatisan 212 yang informasinya akan berangkat</p>	<p>-</p>	<p>-</p> <p>Berjalan dengan Aman dan Kondusif</p>
<p>Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah</p>					

			ke Jakarta agar membatalkan aksi tersebut, karena akan membuat penghasutan dan propaganda di wilayah Kobar, Selaku anak bangsa mari kita membuka tali persaudaraan, Meminta kepada Polres Kobar untuk menindak orang-orang atau kelompok-kelompok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di wilayah Kab. Kobar.			
--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui :

**Kepala Bidang Penanganan Konflik
Dan Kewaspadaan Nasional**

SEMMAN, S.I.P

Nip. 19671017 198803 1 009

Pangkalan Bun, 07 Januari 2019

**Kasubid Kewaspadaan Dini/Analisis Evaluasi Informasi
Kebijakan Strategis**

AGUS SUGIHARTO, S.Sos

Nip : 198 0830 201001 1 011